KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nama : Andi Aditya Riansyah

Nim : 10200120257

Abstrak: Kewenangannya untuk menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penafsiran terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai Peradilan yang secara positif mengoreksi Undang-Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan Negara yang berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat bernegara.

Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengenali secara jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian undang-undang sekaligus pemikiran Hukum Islam terhadap Kewenangan Lembaga Mahkamah Konstitusi, serta buat menciptakan suatu ilmu baru yang bisa menaikkan pengetahuan penulis.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, ialah penelitian yang bertujuan buat mengumpulkan informasi serta data yang ada dalam kepustakaan, semacam buku, naskah, catatan, serta dokumen. Metode pengolahan informasi adalah editing, rekonstruksi informasi, serta sistematisasi informasi. Tata cara analisa informasi bersifat kualitatif menciptakan informasi deskriptif serta pendekatan bersifat induktif.

Bersumber pada hasil penelitian bisa disimpulkan: Kalau kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ialah sesuatu proses dalam menegakkan negara hukum serta demokrasi sehingga tiap putusan yang di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi wajib dilaksanakan serta direalisasikan sebaik-baiknya.

Pendahuluan:

Latar Belakang Masalah:

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 24C jo pasal III aturan peralihan perubahan UUD 1945. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945. Ada pendapat yang berkembang bahwa, kewenangan Mahkamah Agung berkaitan dengan Hak Uji Materil dibiarkan tetap seperti sekarang, dan jika terjadi persoalan di sekitar undang-undang atau konstitusi, maka untuk menanggulangi dan menyelesaikan diserahkan kepada institusi yang kini populer dengan nama Mahkamah Konstitusi, dan ternyata melalui amandemen ketiga Mahkamah Konstitusi ini telah dimasukkan ke dalam UUD 1945.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak dapat dielakkan lagi karena sudah menjadi kenyataan telah tertuang di dalam Undang-undang Dasar. Lain halnya jika kehadiran Mahkamah Konstitusi

dimaksudkan untuk memperluas kewenangan Mahkamah Agung di dalam hal fungsi pengujian hukum dimana fungsi ini kemudian dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi bagian tak terpisahkan dengan Mahkamah Agung dan kehadirannya adalah memperluas posisi Mahkamah Agung yakni tidak lagi sekedar sebagai Pengadilan Negara Tertinggi tetapi juga sebagai Mahkamah Konstitusi. Maksudnya adalah Mahkamah yang berwenang menguji apakah peraturan perundang-undangan dan tindakan-tindakan lain dari pemerintah bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan perubahan struktur ketatanegaraan di Indonesia. Jika sebelumnya terdapat lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, maka sekarang kedudukan lembaga-lembaga tersebut menjadi sejajar dan dinamakan sebagai lembaga negara, Lembaga negara yang dimaksud yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam melaksanakan tugasnya lembaga-lembaga negara tersebut saling menghargai dan menghormati kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing.

Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan perundang-undangan lainnya.

Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK).

Hak konstitusional merupakan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu mencakup hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara (citizen right) maupun hak-hak yang tergolong kedalam hak asasi manusia (human rights). Hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara tersebut tentu saja harus dilindungi dan dijamin oleh warga Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu undang-undang, Mahkamah konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penafsiran/interpretasi terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama sama Presiden dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat bernegara.

Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan untuk menguji Konstitusionalitas Undang-Undang dari pemohon beralasan maka amar pasamenyatakan permohonan dikabulkan (pasal 56 ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003). Sedangkan bila tidak beralasan maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat

diterima (pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003). Terhadap permohonan yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan untuk kemudian memutuskan bertentangan atau tidaknya suatu Undang-Undang, baik karena pembentukan Undang-Undang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan UUD maupun mengenai materi ayat, pasal, dan/atau bagian suatu undang-undang (pasal 51 jo pasal 56 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003).

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penafsiran/ interpretasi terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi Undang-Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat bernegara.

Peradilan adalah terjemah dari Bahasa Arab **اَلْاِئْتِصَالُ** sendiri memiliki beberapa arti, yaitu memutuskan atau menghukum antara dua orang yang berkelahi dan juga memiliki arti mencegah atau menghalang-halangi.

Adapula yang mengatakan bahwa Al Qadha adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya untuk menyampaikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya kepada mereka dengan perantara Al-Quran dan AsSunnah. Atau secara ringkas, menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan menggunakan hukum Allah.

Peradilan atau qadla hukumnya fardlu kifayah dan dapat dilaksanakan dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan tidak ada qadli atau penguasa yang bisa melaksanakan, peradilan dapat dilaksanakan dengan cara tahkim pada seorang muhakkam yakni menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap menguasai hukum, seperti tahkim seorang wanita kepada seseorang untuk bertindak sebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan perkaranya. Dalam suatu kelompok masyarakat yang sudah teratur, jabatan hakim atau qadli dapat dilakukan secara pemilihan dan bai'at oleh ahlul halli wal 'aqdi yakni pengangkatan atas seseorang yang dipercaya oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka dalam masyarakat. Sedang dalam suatu negara yang berpemerintahan, susunan jabatan tersebut dapat dilaksanakan dengan pemberian tauliyah yakni pemberian kekuasaan dari penguasa.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang, sebagaimana diamanatkan Oleh Undang-Undang 1945?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap wewenang Tersebut?

Metode Penelitian:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel, makalah, koran serta bahan lain yang berkaitan dengan masalah

yang di angkat. Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat dan teori-teori yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan filsafat hukum, pendekatan teori hukum, serta pendekatan konstitusional. Pendekatan filsafat hukum dimaksudkan buat mengenali dasar filosofis terdapatnya pengujian peraturan perundang-undangan, pendekatan teoritis digunakan buat mengenali bermacam teori yang bisa dijadikan dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang- Undang serta bermacam persyaratan teoritis yang wajib dijadikan pedoman pengujian.

c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, karenanya pengumpulan informasi yang digunakan merupakan dengan menelusuri serta merecover buku- buku ataupun tulisan- tulisan yang berhubungan dengan kewenangan mahkamah konstitusi dalam undang- undang dasar negeri republik indonesia tahun 1945 dan buku- buku lain yang menunjang pendalaman serta ketajaman analisis penelitian dengan tidak keluar dari sub ulasan. Buat mengumpulkan informasi yang dimaksud di atas di pakai metode penelitian kepustakaan(library research). Metode dicoba dengan metode mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta menekuni data- data yang berupa bahan- bahan pustaka.

d.. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit.

Pembahasan:

KEKUASAN LEMBAGA PERADILAN DALAM ISLAM

A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Tentang Wewenang Lembaga Peradilan

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan Syari"at Allah yang terkandung dalam kitab Al-Qur"an dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari"at yang termasuk dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, syari"at Ilahi yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan. idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup.

Era mekanisasi dan modernisasi telah menempatkan manusia menjadi bagian dan perkembangan yang penuh dengan kontroversi, tantangan dan persaingan yang menyebabkan munculnya nilai dan kebutuhan baru bagi mereka yang tidak lagi sekedar sederhana. Eksistensi syari"at Islam yang

konsisten pada prinsip dan asasnya tidaklah harus statis, tetapi justru harus fleksibel dan dapat mereduksi perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia.

Sebagaimana dibahasakan Hasan Bisri hal tersebut merupakan kegiatan reaktualisasi Islam, dimana secara garis besarnya adalah menekankan pada pengejawantahan Islam dengan mereinterpretasi sumber hukum Islam dengan menggunakan kebutuhan, situasi, dan kondisi dewasa ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka orang Islam (khususnya para alim ulama Islam Umum seluruh umat Islam) dituntut untuk dapat melakukan rekonstruksi terhadap khazanah hukum Islam secara inovatif melalui media ijtihad. Sebab kajian soal ijtihad akan selalu aktual, mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fiqh dan yang namanya fiqh itu senantiasa fleksibel dan perkembangannya berbanding lurus dengan kehidupan dan kebutuhan manusia. Namun dengan adanya fleksibilitas dalam syariat Islam dan tuntutan bahwa hukum Islam harus senantiasa up to date dan dapat mereduksi perkembangan kehidupan umat bukan berarti atau dimaksudkan ajaran Islam, terutama fiqh (hukum) nya tidak konsisten, mudah mengikuti arus zaman dan bebas menginterpretasikan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai kebutuhan hidup manusia. sehingga hukum Islam melalui pintu ijtihad dalam prakteknya dapat menggeser Al-Qur'an dan Sunnah hanya untuk memberikan legitimasi kepentingan manusia, baik politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainya.

1. Prinsip Keadilan

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

Ketegasan perintah untuk berbuat adil itu menjadikan peran hakim (qadhi) berada pada posisi yang penting dan strategis. Mereka merupakan orang yang merefleksikan aturan-aturan Allah untuk tegaknya keadilan. Seorang hakim yang memutus suatu sengketa (perkara) dengan adil, maka berarti dia telah membuka peluang bangsanya untuk menjadi besar dan kuat. Di akhirat dia juga akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga yang penuh kenikmatan.

2. Prinsip transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

3. Prinsip Partisipasi Prinsip ini adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi berokrasi harus diminimalisasi.

4. Prinsip penegakan hukum

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, mendesak diadakan suatu pengaturan hukum untuk menata dan mengendalikan aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk maksud tersebut, dibutuhkan pula ketajaman visi bagi penentu dalam kebijakan politik (decision maker) dalam merancang dan membentuk politik yang sesuai budaya hukum masyarakat.

Dambaan atas penegakan dalam makna supremasi hukum bukan sesuatu yang begitu gampang, karena supremasi hukum tidak mungkin tercapai hanya dengan Undang-Undang belaka, tetapi harus diperhatikan fenomena-fenomena hukum. Dalam hukum Islam, telah menjadi prinsip keharusan adanya law in books dan law in action, yakni Al-Qur'an dan Hadits dijadikan sebagai dasar hukum fundamental, sedang penjabarannya dalam bentuk action telah diatur dalam fiqh, yaitu ketentuan yang mengatur perilaku dan kenyataan hidup dalam masyarakat melalui metode ijtihad.

5. Prinsip Kebaikan Masyarakat (Maslahah Mursalah)

Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik, karena dengan berbuat baik dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat.

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang berarti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islah yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata al-mu nasib yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek Maslahat secara langsung. Maslahah Mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak. Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.

Maslahah Mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode islah, dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam. Menurut istilah para fuqaha, islah adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan maqashid al-Syari'ah al-Ammali (tujuan umum hukum Islam). Istilah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan maqashid al-Syari'ah al-Ammah, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.

Maslahah Mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh Syariat Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam Maslahat, sehingga Maslahat seperti ini disebut dengan Mursalah, yaitu mutlak tidak terbatas.

B. Macam-Macam Lembaga Peradilan Dalam Islam

1. Wilâyah Al-Qadhâ

Wilayah al-qadha adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus yang ditangani lembaga ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim atau non-muslim. Menurut al-Mâwardî, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang qâdhî yaitu laki-laki, berakal dan memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan penglihatan, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah.

Sedangkan tugas dan wewenang al-qadha adalah:

- 1) Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa.
- 2) Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberikan sanksi kepada yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah.
- 3) Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak, atau idiot.
- 4) Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya.
- 5) Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah.
- 6) Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah.
- 7) Melaksanakan hukuman bagi para terhukum.
- 8) Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka.
- 9) Meneliti para saksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya.
- 10) Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan, maupun rakyat biasa.

2. Wilayah al-mazhalim

Kata wilayah al-mazalim merupakan gabungan dua kata, yaitu wilayah dan al-mazalim. Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata al-mazalim adalah bentuk jamak dari mazlimah yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman.

Secara terminologi wilayah al-mazalim berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.

Wilayah al-mazalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Wilayah al-mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. merupakan lembaga peradilan yang khusus menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, para hakim, maupun anak-anak orang yang berkuasa. Al-Mâwardi menjelaskan bahwa tugas dan Wewenang lembaga ini adalah:

- 1) Penganiayaan para penguasa baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan.
- 2) Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara lainnya.
- 3) Mengontrol dan mengawasi keadaan para pejabat
- 4) Pengaduan yang diajukan oleh Tentara karena gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya
- 5) Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang zalim
- 6) Memperhatikan harta-harta wakaf.
- 7) Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim sendiri, karena yang dijatuhkan hukumannya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya.
- 8) Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh muhtasib.
- 9) Memelihara hak-hak Allah yaitu ibadah-ibadah seperti salat Jumat, „Id, haji, dan jihad.
- 10) Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Muhammad Iqbal mendefinisikan Wilayah al-Mazhalim sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar HAM. Artinya segala Masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme Negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman

Melihat kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh Wilayah alMazhalim diantaranya:

- 1) memeriksa perkara-perkara berkenaan dengan penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan dan
- 2) mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat. Maka lembaga ini didesain untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap perorangan maupun golongan, juga sebagai lembaga yang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap para penguasa atau pejabat Negara.

3. Wilayah al-Hisbah

Hisbah merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan-Nya secara nyata. Tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapat rida dari Allah. Hakim lembaga ini disebut muhtasib yang bertugas mengawasi berlaku tidaknya Undang-Undang

ketertiban umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Muhtasib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) adil,
- (2) merdeka,
- (3) memiliki pandangan atau berwawasan luas serta tajam pemikirannya,
- (4) teguh dalam pendirian agama,
- (5) memiliki pengetahuan tentang tindakan-tindakan kemunkaran yang terjadi dalam masyarakat.

Dari beberapa persyaratan tersebut, menurut Ibn Taymiyyah, ilmu pengetahuan, kelembutan, dan kesabaran dianggap sebagai persyaratan yang terpenting. Dengan demikian orang yang diangkat menjadi muhtasib haruslah orang yang memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki kompeten dalam masalah hukum, pasar, dan urusan industrial.

Tugas dan Wewenang muhtasib adalah menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar, membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum, mencegah penduduk membangun rumah-rumah yang menyebabkan penyempitan jalan, mengawasi penipuan dalam takaran, ukuran, dan timbangan di pasar, dan melarang para buruh agar tidak berlebihan muatan yang dapat membahayakan keselamatan manusia.

Menurut Ibn Taymiyyah, muhtasib bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang bukan merupakan Wewenang para penyelenggara Negara, Hakim, anggota dewan, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa hisbah merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan Wewenang tersendiri di luar Wewenang qadha, mazhâlim, maupun lembaga lainnya. Penjabaran dari tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam.

Pertama, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah, yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktivitas keagamaan mereka seperti memerintahkan salat lima waktu, Jumat, dan pemeliharaan masjid.

Kedua, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak manusia yaitu menaruh perhatian besar terhadap implementasi prinsip keadilan dalam masyarakat, seperti pengawasan terhadap akurasi timbangan dan takaran, serta inspeksi harga dan barang di pasar.

Ketiga, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan manusia yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pelayanan umum, seperti memelihara kondisi jembatan, kebersihan jalan raya, mengadakan ronda, dan tindakan preventif terhadap pelbagai fasilitas umum agar tetap terpelihara dengan baik.

Fungsi utama muhtasib adalah melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, dalam memberikan hukuman ia harus memastikan bahwa perbuatan itu telah benar-benar melanggar ketentuan syariah. Ia harus dapat berlaku bijaksana sehingga tindakannya itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah yang hendak dihilangkan. Ini berarti bahwa sebelum muhtasib menghentikan atau menghukum suatu pelanggaran ia harus membuat rencana yang matang untuk mengantisipasi reaksi balik yang ditimbulkan.

Dengan kata lain, tugas muhtasib adalah berhubungan dengan amar ma„rûf nahî munkar yang tidak termasuk masalah-masalah hudud, qishash, diyat, dan al-ahwal al-syakhshiyyah yang telah diatur ketentuannya oleh nas. Muhtasib hanya berwenang menangani perkara-perkara yang bersifat pelanggaran ringan. Kewenangannya adalah menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang telah terjadi. Artinya, ketika terjadi suatu pelanggaran maka muhtasib langsung bertindak.

C. Peran Dan Fungsi Lembaga Peradilan Dalam Islam

Tujuan awal pembentukan kekuasaan (sultah) dalam sebuah negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat. Sehingga tak sepatutnya kekuasaan apapun menggunakan Kewenangannya untuk melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Untuk itulah lembaga peradilan dibentuk untuk melakukan kontrol/pengawasan terhadap penguasa, dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan politik.

Negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia. Di samping itu, negara juga didirikan untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan satu orang atau golongan terhadap orang atau golongan lain. Negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan memaksa agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan.

Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.

Sebagai lembaga Negara yang ditugasi untuk menyelesaikan dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam. Untuk terwujudnya hal tersebut di atas, peradilan Islam mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Menetapkan sangsi dan menerapkannya kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum.
3. Terciptanya amar ma„ruf nahi munkar.
4. Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat.
5. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdirinya hukum Islam.

PRIHAL KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Seiring dengan pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukannya proses politik hukum yang sangat panjang dengan melalui sebuah proses amandemen konstitusi (UUD 1945), dimana menurut A. Mukhtie Fadjar perubahan paradigma tersebut ialah : dari paradigm Negara ke paradigm masyarakat dengan semangat penguatan civil society. dari paradigma integralistik ke paradigma kedaulatan rakyat/demokrasi dengan semangat penghormatan HAM.

Dari paradigma Negara kekuasaan (machtstaat) ke paradigma Negara hukum (rechstaat) dengan semangat supremasi hukum, yang adil dan responsif. Salah satu dari sekian perubahan paradigm di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dianut dalam UUD 1945 pasca amandemen ialah tidak ditempatkannya lagi MPR pada posisi yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga Negara lainnya. MPR ditempatkan pada posisi lembaga tinggi Negara yang kedudukannya sejajar dengan semua lembaga tinggi lainnya, tak terkecuali Mahkamah Konstitusi.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu ditegaskan pula, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan tersebut, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah :

- 1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Selain hal tersebut di atas, gagasan penguatan checks and balances di dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan faktor lahirnya Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan.

Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (separation of power) secara fungsional dan menerapkan check and balances untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (distribution of power) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara, dengan alasan bahwa:

1. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
2. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
3. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24C) pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di samping Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.

B. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi

Organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri atas tiga komponen, yaitu:

1. Para Hakim.
2. Sekretariat Jenderal, dan
3. Kepaniteraan

C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Nasional

Menurut Harjono, antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, keduanya merupakan lembaga tinggi Negara yang terpisah, tetapi memiliki hubungan yang bersifat horizontal fungsional. Artinya, kedua lembaga tersebut tidak saling mensubordinasikan, tetapi masing-masing mempunyai kompetensi secara mandiri. Akan tetapi walaupun keduanya memiliki kompetensi dan Kewenangan yang berbeda, masing-masing tetap dalam fungsi besarnya, yaitu sebagai lembaga tinggi Negara yang memiliki kekuasaan kehakiman atau judicial power.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif (Presiden), maka Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman (judicial of power) yang lahir dari ketidakadilan dan pelanggaran konstitusi (UUD 1945) merupakan lembaga mandiri yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun, meskipun keanggotaan dari 9 (Sembilan) hakim konstitusi berasal dari 3 orang hakim yang dipilih oleh Presiden, di mana tugas, wewenang struktur dalam hukum acaranya diatur dalam UUD yang notabene disahkan oleh Presiden. Meskipun demikian tidak berarti kedudukan Mahkamah Konstitusi subordinasi dari kedudukan Presiden, melainkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegaskan hukum dan keadilan dalam lingkup Wewenang yang dimiliki. Mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi selain Mahkamah Agung, tidak boleh dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, melainkan juga menjadi lembaga yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat ke arah yang positif. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud dari pemisahan kekuasaan yang mengadili dalam urusan bernegara dan termasuk bagian dari lembaga yudikatif yang berdiri sendiri. Montesquieu memperkenalkan hal tersebut dengan sebutan trias politica.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai “salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Pasal 3 UU Mahkamah Konstitusi). Menurut Jimly Asshiddiqie, kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai terutama di Negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan yang otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan

sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan negara Konstitusional modern. Mahkamah Konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak Konstitusional.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berada dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dan dilatar belakangi pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, anatara lain prinsip negara hukum dan demokrasi , perlindungan hak asasi manusia , serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berada dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dan dilatar belakangi pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, anatara lain prinsip negara hukum dan demokrasi , perlindungan hak asasi manusia , serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam penjelasan umum UU Mahkamah Konstitusi di sebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara Ketatanegaraan atau perkara Konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi.

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas undang-undang nomor 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu undang-undang, Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi ini menurut Pasal 7B dan Pasal 24C kewenangannya bukan hanya menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 melainkan meliputi :

1. Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945
2. Mengadili Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
3. Memutus Pembubaran Partai Politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum

LEMAGA MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI UUD DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Lembaga Mahkamah Konstitusi

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah populer fiqh siyasah sering kali disebut sebagai ilmu Tata Negara, dalam hal ini berada pada konsep Negara Islam.

Perihal konstitusi ini ternyata telah ada di dalam Islam jauh sebelum mahkamah konstitusi diperkenalkan pertama kali di Australia pada sekitar tahun 1919. Ide Konstitusi tersebut ada di dalam Al Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung.

Sebagai lembaga baru Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, disamping Mahkamah Agung. Meskipun ide konstitusi itu telah ada dalam Islam sejak masa Rasulullah, namun lembaga konstitusi tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Meskipun demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat diterima dalam Islam. Jika ia memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam syariat yakni :

1. Prinsip Keadilan
2. Prinsip Transparansi
3. Prinsip Partisipasi
4. Prinsip Penegakan Hukum
5. Prinsip Kebaikan Masyarakat (Maslahah Mursalah)

Proses pembentukan mursalah sebagai produk hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara" dalam menetapkan hukum;
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara" tersebut tidak ada petunjuk syara" secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara" yang mengakuinya.

Jadi dalam Syari"at Islam harus ada prinsip yang berkaitan dengan AlQur"an dan sunnah. Dua pilar itu merupakan kekuatan masyarakat Islam dan Agama Islam, satu cara hidup dan tatanan sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan. Namun adanya fleksibilitas dalam Syari"at Islam harus senantiasa up to date dan mereduksi perkembangan kehidupan umat.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara dengan kewenangannya, dan terkait peraturan perundang-undangan yang merupakan objek kajian ilmu Hukum Tata Negara. Sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan meninjau kedudukan Mahkamah Konstitusi menggunakan tinjauan fiqh siyasah (ilmu tata negara dalam konsep negara Islam).

Qadhaiyyah atau peradilannya yang mesti diisi oleh Qadhi yang memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Pelaksanaan Peradilan yang baik dan sesuai tuntutan Islam ini sangat relevan untuk diterapkan di negara manapun dan di negara yang

berideologi apapun karena banyak sekali kemaslahatan yang dijunjung tinggi oleh keberadaan peradilan Islam itu sendiri.

B. Wewenang Kelembagaan

Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk untuk menegaskan hukum dan keadilan dalam lingkup Wewenang yang dimiliki.

Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang, Sebagaimana Damanatkan Oleh Undang-Undang 1945, Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang adalah pengujian mengenai nilai Konstitusionalitas Undang-Undang itu, baik dari segi formil ataupun materil. Oleh karena itu pada tingkat pertama, pengujian Konstitusionalitas itu haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Konstitusionalitas sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian Konstitusionalitas. Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah Undang-Undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang saja, bukan peraturan lain yang tingkatannya berada dibawah Undang-Undang.

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjadi ketetapan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan yang berada di dalam suatu negara dan dibuat dengan tujuan untuk membantu membangun negara. Ruang lingkup peraturan nya antara lain mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan Kewenangan nya sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta meningkatkan masyarakat.

Kesimpulan: A. Kesimpulan

1. kewenangannya untuk menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penafsiran terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi Undang-Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat bernegara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu proses di dalam menegakkan Negara Hukum dan demokrasi sehingga untuk menciptakan hal yang demikian, setiap putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan dan di realisasikan dengan sebaikbaiknya.

2. Menurut pandangan Hukum Islam bahwa Mahkamah konstitusi tidak pernah ada dalam sejarah Islam tetapi keberadaanya di bolehkan atas dasar prinsip:

a. Masalah Mursalah merupakan masalah yang tidak terdapat dalil syara tiba buat mengakuinya ataupun menolaknya. Masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam serta petunjuk tertentu yang meyakinkan tentang pembutian ataupun penolakannya.

b. Qaidah ushul mengatakan : *مَخْلُوقٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغُيُوبِ* (asal dari segala sesuatu adalah boleh) Demi kemaslahatan yang besar tersebut, maka penulis berpendapat selayaknya maka diperbolehkan dan dapat diterima Mahkamah Konstitusi diberikan Wewenang untuk melakukan Pengujian terhadap UUD 1945.

Saran:

Dari hasil kesimpulan di atas peneliti telah melaksanakan analisis informasi pada penelitian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang- Undang Terhadap Undang- Undang Dasar 1945 Presfektif Hukum Islam, Hingga anjuran ini diharapkan bisa dijadikan selaku bahan masukan serta pertimbangan oleh pihak- pihak yang terpaut:

1. Memandang berartinya lembaga Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 di perlukan peraturan yang jelas serta baik lewat amandemen ulang ataupun peraturan yang sifatnya mengendalikan tata metode Pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945.

Dalam membuat Undang- Undang pemerintah serta DPR di harapkan betul- betul mencermati kepentingan rakyat, supaya Penguasa ataupun pejabat negeri tidak menyalahgunakan kekuasaannya melaluikewenangan yang dipunyai. Kewenangan yang dipunyai ini tercantum dalam pembuatan kebijakan maupun pembuatan peraturan Perundang- Undangan. Sehingga sangat bisa jadi kebijakan serta Peraturan Perundang- Undangan yang terbuat memiliki faktor kezaliman terhadap hak- hak rakyat.

2. Diperlukan lembaga yang pula mempunyai kekuatan yang balance dengan penguasa ataupun pejabat negeri buat mengestimasi pelanggaran yang dicoba oleh penguasa ataupun pejabat negeri lewat kewenangannya. Perihal demikian dicoba dalam rangka melindungi hak- hak rakyat yang sepatutnya mereka miliki.

Daftar Pustaka:

Buku-buku:

Abu Daud Busro. Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara,2015.

Hasan Mu"arif Ambary,""Muhtasib"" , Suplemen Ensiklopedia Islam, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay S.H. Mahkmah Konstitusi, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, S.H. Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, April 2006

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke II, 2011.

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.)

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta:
Pernadamedia Group, 2016.

M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2002.

MD Moh. Mahfud, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta :
Raja Grafindo Persada, 2010.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Grafik Grafika, Jakarta, Cetakan Ke 3, 2011

Jurnal:

Mohammad Rusfi, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Jurnal AL
„ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h. 63 (On-Line) tersedia di
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203> (23 Maret 2019,
pukul 20:30 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Pasal:

Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d 24/2003, Tentang Kewenangan Mahkamah
Konstitusi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Tentang Undang-Undang Dasar 1945.